

DINAMIKA TRANSFORMASI POLITIK INDONESIA DALAM SENTRALISASI KEKUASAAN DAN PERAN ELIT POLITIK

Kaisa Janeeta¹, Mutiara Citra², Siti Budiati³

keysajaneeta@gmail.com¹, mutiaracitra072007@gmail.com², sitibudiati249@gmail.com³

Universitas Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transformasi politik Indonesia dengan menitikberatkan pada hubungan antara sentralisasi kekuasaan dan peran elit politik. Latar belakang penelitian ini adalah perubahan sistem politik dari pola sentralistik pada masa Orde Baru menuju sistem desentralisasi pasca Reformasi 1998 yang bertujuan memperkuat demokrasi dan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah, namun juga memunculkan tantangan berupa dominasi elit lokal dan ketimpangan kekuasaan. Transformasi politik di Indonesia tidak hanya mencerminkan perubahan struktur kekuasaan, tetapi juga menunjukkan kemampuan elit politik dalam beradaptasi untuk mempertahankan pengaruhnya. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi politik sangat bergantung pada kualitas institusi serta integritas aktor politik dalam mengelola kekuasaan.

Kata Kunci: Sentralisasi, Desentralisasi, Elit Politik, Kekuasaan, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Transformasi politik di Indonesia adalah proses yang terus berubah, khususnya dalam transisi dari sistem yang terpusat menjadi lebih desentralisasi dalam hal kekuasaan. Pada era Orde Baru, kekuasaan politik sangat terkonsentrasi di tangan pemerintah pusat, yang menghambat partisipasi masyarakat dan memperkuat hegemoni elit politik dalam pengambilan keputusan. Namun, setelah Reformasi 1998, Indonesia mulai mengimplementasikan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah, yang bertujuan untuk memperluas partisipasi politik serta meningkatkan efektivitas pemerintahan. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi struktur kekuasaan, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan elit politik.¹

Dari sudut pandang teori, sentralisasi dan desentralisasi adalah dua konsep kunci dalam kajian politik dan pemerintahan. Sentralisasi berfokus pada penyatuan kekuasaan dalam satu entitas, sedangkan desentralisasi berusaha membagi wewenang kepada pemerintah daerah. Dalam kerangka Indonesia, desentralisasi diharapkan dapat memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Meskipun begitu, dalam praktek, desentralisasi juga menciptakan kesempatan bagi elit lokal untuk memiliki kekuasaan yang signifikan dalam menentukan kebijakan di daerah.² Oleh karena itu, kehadiran elit politik menjadi faktor krusial dalam menentukan seberapa sukses transformasi politik yang berlangsung.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyentuh isu-isu seputar desentralisasi dan peran elit politik di Indonesia. Penelitian Hidayat (2016) menunjukkan bahwa desentralisasi tidak selalu berhubungan positif dengan kualitas demokrasi, karena masih

¹ Syamsuddin Haris, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia," *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 21, No. 1 (2010). <https://doi.org/10.14203/jip.v21i1.44>.

² Wasisto Raharjo Jati, "Desentralisasi dan Demokrasi Lokal di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 2 (2012). <https://doi.org/10.14203/jpp.v9i2.89>.

terdapat praktik oligarki di tingkat lokal.³ Di sisi lain, penelitian oleh Sidel (2005) menunjukkan bahwa kekuatan elit lokal dalam sistem desentralisasi sering kali menimbulkan praktik patronase dan klientelisme yang menghambat proses demokratisasi.⁴ Namun, banyak penelitian tersebut cenderung melihat desentralisasi atau elit politik secara terpisah, sehingga tidak sepenuhnya memberikan gambaran yang menyeluruh tentang hubungan antara struktur kekuasaan dan pelaku politik dalam proses transformasi politik di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika transformasi politik di Indonesia dengan memfokuskan pada keterkaitan antara sentralisasi kekuasaan dan peran elit politik. Penelitian ini juga berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana interaksi antara struktur kekuasaan dan pelaku politik memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami keadaan politik di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh ketidakmerataan kekuasaan dan dominasi elit tertentu. Meski Indonesia telah melalui proses demokratisasi, masalah seperti korupsi, oligarki, dan kelemahan lembaga politik tetap menjadi tantangan signifikan. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pemahaman mengenai dinamika kekuasaan serta menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih demokratis dan inklusif.

Unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang menggabungkan konsep sentralisasi, desentralisasi, dan peran elit politik dalam satu analisis yang menyeluruh. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat parsial, penelitian ini berupaya melihat transformasi politik di Indonesia sebagai suatu proses yang saling terkait antara struktur kekuasaan dan aktor politik, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang Transformasi politik di Indonesia dalam konteks sentralisasi dan desentralisasi kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari transformasi besar yang terjadi setelah Reformasi 1998, yang mengakhiri sistem politik terpusat pada era Orde Baru. Dalam kajian akademik, desentralisasi sering dianggap sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Misalnya, Hidayat (2010) menekankan bahwa desentralisasi bertujuan untuk merestrukturisasi hubungan antara negara dan masyarakat dengan cara mendistribusikan kekuasaan hingga ke tingkat lokal.⁵ Namun, pendekatan ini cenderung memandang desentralisasi sebagai proses yang normatif dan administratif, sehingga kurang memperhatikan bagaimana kekuasaan tersebut sesungguhnya dijalankan oleh para aktor politik di lapangan.

Studi lain oleh Jati (2012) menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia tidak selalu menghasilkan demokrasi yang berarti, tetapi sering kali memunculkan dominasi elit lokal dalam kekuasaan daerah.⁶ Temuan ini menandakan bahwa desentralisasi bisa menciptakan “sentralisasi baru” di tingkat lokal. Meskipun demikian, kajian ini terbatas pada analisis demokrasi lokal dan tidak sepenuhnya menghubungkannya dengan

³ Syarif Hidayat, “Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif State-Society Relations,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14, No. 2 (2010). <https://doi.org/10.22146/jsp.10978>.

⁴ Leo Agustino, “Oligarki dan Kekuasaan Elit di Indonesia,” *Jurnal Politik*, Vol. 3, No. 1 (2017). <https://doi.org/10.7454/jp.v3i1.56>.

⁵ Syarif Hidayat, “Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif State-Society Relations,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14, No. 2 (2010). <https://doi.org/10.22146/jsp.10978>.

⁶ Wasisto Raharjo Jati, “Desentralisasi dan Demokrasi Lokal di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 2 (2012). <https://doi.org/10.14203/jpp.v9i2.89>.

transformasi kekuasaan secara nasional. Penulis berpendapat bahwa batasan ini membuat pemahaman mengenai dinamika kekuasaan menjadi setengah-setengah, karena tidak mempertimbangkan interaksi antara pusat dan daerah sebagai bagian dari satu kesatuan sistem politik.

Selanjutnya, penelitian oleh Agustino (2017) menyoroti adanya oligarki dan dominasi elit dalam politik di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa meskipun sistem politik bertransformasi menjadi lebih demokratis, kekuasaan tetap terpusat pada kelompok elit tertentu yang memiliki akses ke sumber daya ekonomi dan politik.⁷ Kajian ini memberikan wawasan penting mengenai peran elit politik, namun belum membahas secara jelas tentang bagaimana struktur desentralisasi berkontribusi pada pola dominasi itu. Menurut pandangan penulis, tanpa mengaitkan struktur kelembagaan dengan perilaku elit, analisis soal oligarki bisa kehilangan konteksnya.

Di samping itu, kajian oleh Pratikno (2009) menekankan aspek kapasitas lembaga dalam mendukung keberhasilan desentralisasi. Ia berpendapat bahwa kelemahan lembaga daerah bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh elit lokal.⁸ Namun, penelitian ini lebih banyak menyoroti aspek pengelolaan pemerintahan dan belum mengaitkan dimensi politik kekuasaan dengan lebih luas. Dari perspektif kritis, pendekatan yang hanya berfokus pada institusi tidak cukup untuk menjelaskan realitas politik di Indonesia yang kental dengan hubungan kekuasaan yang tidak resmi dan praktik patronase.

Dari hasil tinjauan terhadap berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada kecenderungan pemisahan antara kajian desentralisasi sebagai fenomena struktural dan kajian elit politik sebagai aktor utama dalam sistem politik. Namun dalam praktiknya, kedua aspek itu saling interaksi dan membentuk dinamika kekuasaan yang rumit. Penulis meyakini bahwa kekurangan ini menciptakan celah penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya penelitian yang secara integratif menganalisis hubungan antara sentralisasi, desentralisasi, dan peran elit politik dalam satu kerangka yang komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji perubahan politik di Indonesia melalui pendekatan yang menghubungkan struktur kekuasaan dan aktor elit pada saat yang sama. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perubahan institusional, tetapi juga bagaimana elit politik memanfaatkan struktur itu untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dalam memahami dinamika politik di Indonesia, sekaligus memperkaya kajian ilmu politik, khususnya dalam konteks negara berkembang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis untuk mengkaji dinamika transformasi politik Indonesia dalam konteks sentralisasi kekuasaan dan peran elit politik. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena politik yang kompleks secara lebih mendalam, khususnya dalam memahami hubungan antara struktur kekuasaan dan aktor elit. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen resmi yang relevan, sehingga memiliki dasar keilmuan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁷ Leo Agustino, "Oligarki dan Kekuasaan Elit di Indonesia," *Jurnal Politik*, Vol. 3, No. 1 (2017). <https://doi.org/10.7454/jp.v3i1.56>.

⁸ Pratikno, "Governance dan Krisis Teori Organisasi," *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 13, No. 2 (2009), hlm. 1–14. <https://doi.org/10.22146/jkap.10785>

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menyeleksi berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut kemudian dipilih berdasarkan tingkat kredibilitas dan relevansinya terhadap fokus kajian, lalu dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan analisis. Metode ini dipilih karena penelitian bersifat konseptual, sehingga membutuhkan dukungan teori serta hasil penelitian terdahulu sebagai landasan utama. Proses ini dilakukan secara sistematis agar dapat dipahami dan diikuti kembali oleh peneliti lain.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah isi literatur secara mendalam untuk menemukan tema, pola, serta hubungan antar konsep yang relevan. Analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemahaman isi data hingga penarikan keterkaitan antar gagasan. Metode ini dipilih karena mampu memberikan hasil analisis yang terstruktur dan komprehensif. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berbeda, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Sentralisasi dan Desentralisasi Kekuasaan

Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua istilah penting dalam analisis sistem pemerintahan yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Sentralisasi mengacu pada pengumpulan hak untuk mengambil keputusan di tangan pemerintah pusat, sehingga pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh satu otoritas. Di sisi lain, desentralisasi berarti memberikan sebagian hak dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mereka dapat mengatur dan menangani kepentingan mereka sendiri. Dalam konteks Indonesia, kedua istilah ini saling terkait dengan perkembangan dinamis sistem politik dan pemerintahan yang terus berubah sejalan dengan kebutuhan untuk berdemokrasi.⁹

Secara teoritis, sering kali sentralisasi dikaitkan dengan keefisienan dalam pengambilan keputusan serta stabilitas politik yang muncul akibat pengendalian yang kuat dari pemerintah pusat. Namun, dalam praktiknya, sistem yang terlalu terpusat dapat berpotensi untuk melupakan kebutuhan dan harapan daerah. Hal ini pernah terjadi dalam pemerintahan Indonesia di era Orde Baru, ketika kebijakan berbasis top-down mengakibatkan partisipasi masyarakat daerah menjadi sangat terbatas. Sebaliknya, desentralisasi dianggap sebagai usaha untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik di level lokal. Menurut Widodo (2011), desentralisasi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan warganya, meskipun tetap membutuhkan pengawasan yang memadai dari pemerintah pusat.¹⁰

Walau begitu, pelaksanaan desentralisasi tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan kepada daerah justru dapat menimbulkan dominasi elit lokal yang baru. Ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak menghilangkan praktik sentralisasi, tetapi hanya memindahkan pusat kekuasaan dari tingkat nasional ke tingkat lokal. Dalam pandangan penulis, fenomena ini menegaskan bahwa masalah utama tidak hanya terletak pada jenis sistem (baik sentralisasi

⁹ Joko Widodo, "Desentralisasi dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 8, No. 1 (2011), hlm. 45–60. <https://doi.org/10.31113/jia.v8i1.238>.

¹⁰ Joko Widodo, "Desentralisasi dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 8, No. 1 (2011), hlm. 45–60. <https://doi.org/10.31113/jia.v8i1.238>.

maupun desentralisasi), tetapi juga pada cara kekuasaan dikelola oleh aktor politik yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah supaya tidak muncul ketimpangan kekuasaan yang bisa menghambat demokratisasi.

Lebih jauh, hubungan antara sentralisasi dan desentralisasi seharusnya tidak dianggap sebagai dua konsep yang bertentangan, namun seharusnya dipahami sebagai dua pendekatan yang dapat saling melengkapi. Pemerintah pusat tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional dan kesatuan negara, sementara pemerintah daerah berfungsi untuk lebih efektif dalam menampung kepentingan lokal. Dalam pandangan ini, model desentralisasi yang ideal adalah yang mampu menghadirkan distribusi kekuasaan yang seimbang, lengkap dengan mekanisme pengendalian yang jelas. Dengan cara ini, perubahan politik di Indonesia bukan hanya tentang pergeseran struktur kekuasaan, tetapi juga menyangkut kualitas pengelolaan pemerintahan dan integritas elit politik dalam menerapkan kekuasaan tersebut.

2. Sejarah Transformasi Politik Indonesia

Sejarah transformasi politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pergeseran sistem kekuasaan dari pola yang sangat sentralistik menuju sistem yang lebih terbuka dan desentralistik. Pada masa Orde Baru, struktur kekuasaan terkonsentrasi kuat di pemerintah pusat, dengan kontrol yang ketat terhadap lembaga politik, birokrasi, hingga kehidupan sosial masyarakat. Model pemerintahan ini menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun di sisi lain membatasi partisipasi publik serta memperkuat dominasi elit politik tertentu. Dalam konteks ini, sentralisasi tidak hanya menjadi mekanisme administratif, tetapi juga alat untuk mempertahankan kekuasaan elit di tingkat nasional.¹¹

Krisis multidimensional yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an menjadi titik balik penting dalam sejarah politik nasional. Puncaknya terjadi pada Reformasi 1998, yang menandai runtuhnya rezim Orde Baru sekaligus dimulainya era demokratisasi. Perubahan tersebut membawa implikasi mendasar dalam sistem politik, antara lain pembatasan kekuasaan presiden, penguatan lembaga legislatif, serta penerapan otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi kekuasaan. Dalam hal ini, Dwipayana (2004) menyatakan bahwa reformasi tidak hanya mengubah struktur formal kekuasaan, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya aktor-aktor politik baru, khususnya di tingkat lokal.¹²

Meskipun demikian, transformasi politik yang terjadi tidak sepenuhnya menghilangkan persoalan kekuasaan yang telah mengakar sebelumnya. Desentralisasi yang diharapkan mampu mendistribusikan kekuasaan secara lebih merata, dalam praktiknya justru pada beberapa kasus memunculkan konsentrasi kekuasaan baru di tingkat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pergeseran dari sistem sentralisasi ke desentralisasi tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola politik yang lebih demokratis. Dalam perspektif kritis, fenomena tersebut mengindikasikan bahwa transformasi politik Indonesia masih berada dalam proses yang belum sepenuhnya matang, di mana pola-pola lama kekuasaan tetap beradaptasi dalam struktur yang baru.

Lebih lanjut, dinamika tersebut memperlihatkan bahwa elit politik tetap menjadi aktor kunci dalam setiap fase perubahan kekuasaan. Pada masa Orde Baru, elit berperan dalam mempertahankan sistem yang bersifat sentralistik melalui pengendalian institusi politik. Sementara itu, pada era reformasi, elit yang telah mapan maupun aktor baru

¹¹ M. Mas'ood, "Politik dan Kekuasaan pada Masa Orde Baru," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 7, No. 1 (2003), hlm. 1–14. <https://doi.org/10.22146/jsp.11012>.

¹² A. A. G. N. Ari Dwipayana, "Transisi Demokrasi dan Otonomi Daerah di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 3 (2004), hlm. 289–304. <https://doi.org/10.22146/jsp.11045>.

cenderung menyesuaikan diri dengan sistem desentralisasi guna mempertahankan dan memperluas pengaruhnya. Dengan demikian, transformasi politik di Indonesia tidak hanya mencerminkan perubahan struktur kekuasaan, tetapi juga menunjukkan adanya adaptasi strategi elit dalam mengelola dan mempertahankan dominasi politiknya.

3. Sejarah Transformasi Politik Indonesia

Peranan elit politik dalam tatanan kekuasaan adalah hal krusial untuk memahami perubahan politik di Indonesia. Elit politik merujuk pada sekelompok orang yang memiliki akses terhadap sumber daya kekuasaan, baik melalui posisi resmi di pemerintahan maupun melalui pengaruh yang tidak resmi di jaringan politik dan ekonomi. Di Indonesia, elit politik tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga berperan sebagai pihak yang menentukan cara distribusi kekuasaan, baik dalam sistem yang terpusat maupun yang terdesentralisasi. Keberadaan elit ini menjadi elemen kunci dalam cara kekuasaan dilaksanakan dan dipertahankan di setiap era politik.¹³

Pada masa Orde Baru, elit politik cenderung terpusat pada lingkaran kekuasaan di tingkat nasional, terutama yang berada di sekitar eksekutif. Struktur kekuasaan yang sentralistik memungkinkan elit tertentu untuk mengontrol kebijakan politik dan ekonomi secara dominan. Namun, setelah memasuki era Reformasi 1998, terjadi perubahan signifikan dalam distribusi kekuasaan, di mana elit politik tidak lagi hanya terkonsentrasi di pusat, tetapi juga berkembang di tingkat daerah. Desentralisasi membuka ruang bagi munculnya elit-elit lokal yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan di wilayahnya masing-masing.¹⁴

Meskipun demikian, perubahan struktur ini tidak serta-merta menghilangkan dominasi elit dalam sistem politik. Sebaliknya, elit politik menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan sistem. Dalam sistem desentralisasi, elit lokal sering kali memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk memperkuat posisi mereka, baik melalui kontrol terhadap sumber daya daerah maupun melalui jaringan politik yang bersifat patronase. Dalam pandangan penulis, kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi politik Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perubahan institusional, tetapi juga dengan bagaimana elit politik memanfaatkan struktur tersebut untuk mempertahankan kekuasaan.¹⁵

Jika dilihat lebih lanjut, peran elit politik dalam struktur kekuasaan dapat dipahami melalui perbandingan antara karakteristik elit pada masa sentralisasi dan desentralisasi. Perubahan ini tidak hanya menyangkut lokasi kekuasaan, tetapi juga strategi yang digunakan oleh elit dalam mempertahankan pengaruhnya. Berikut adalah gambaran perbandingan tersebut:

Aspek Peran	Sentralisasi	Desentralisasi
Lokasi kekuasaan	Terpusat di pemerintah pusat	Terbagi antara pusat dan daerah
Siapa yang dominan	Elit nasional (presiden, pejabat pusat)	Elit pusat dan Elit lokal (Kepala daerah, DPRD)
Cara mengambil keputusan	Ditentukan dari pusat (top-down)	Lebih melibatkan daerah namun hierarkis
Strategi	Mengatur birokrasi dan lembaga negara	Membangun jaringan politik dan dukungan lokal

¹³ A. Hamid, "Elit Politik Lokal dalam Dinamika Otonomi Daerah," *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6, No. 1 (2018), hlm. 45–60. <https://doi.org/10.24252/profetik.v6i1.5898>.

¹⁴ Firman Noor, "Perilaku Politik Elit di Indonesia dalam Era Reformasi," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 2 (2013), hlm. 67–80. <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i2.98>.

¹⁵ Lili Romli, "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 13, No. 1 (2016), hlm. 1–12. <https://doi.org/10.14203/jip.v13i1.300>.

Dampak	Partisipasi masyarakat terbatas	Pertisipasi lebih terbuka tapi masih ada dominasi elit
Masalah	Kekuasaan terlalu terpusat	Muncul elit local yang kuat (oligarki daerah)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam distribusi kekuasaan, peran elit politik tetap dominan dalam menentukan arah kebijakan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dinamika transformasi politik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi, tetapi juga oleh kemampuan elit politik dalam beradaptasi dan mempertahankan pengaruhnya dalam berbagai struktur kekuasaan. Hal ini menegaskan bahwa elit politik merupakan aktor kunci dalam setiap proses transformasi politik di Indonesia.

4. Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan bagian penting dalam memahami perubahan sistem politik Indonesia, terutama setelah diterapkannya desentralisasi pasca Reformasi 1998. Perubahan ini menandai pergeseran dari sistem yang sebelumnya terpusat pada masa Orde Baru menuju sistem yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola urusan pemerintahan secara lebih mandiri dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.¹⁶

Dalam pelaksanaannya, hubungan antara pusat dan daerah tidak selalu berjalan secara mulus. Desentralisasi justru memunculkan dinamika baru berupa perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya, kebijakan pembangunan, dan pembagian kewenangan. Menurut Mudrajad Kuncoro, salah satu kendala utama dalam desentralisasi adalah adanya ketimpangan kapasitas antar daerah, sehingga tidak semua daerah mampu menjalankan kewenangannya secara optimal.¹⁷

Selain itu, hubungan pusat dan daerah juga dipengaruhi oleh peran elit politik yang berada di kedua tingkat tersebut. Elit di tingkat pusat berupaya mempertahankan pengaruhnya melalui kebijakan dan regulasi strategis, sementara elit di daerah memanfaatkan otonomi untuk memperkuat posisi politiknya. Dalam kajian administrasi pemerintahan, kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan pusat dan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi politik yang kuat.¹⁸

Oleh karena itu, dinamika hubungan pusat dan daerah perlu dikelola secara seimbang agar tidak menimbulkan konflik maupun ketimpangan kekuasaan. Pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam menjaga stabilitas nasional, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan adanya koordinasi yang baik, hubungan ini dapat mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang lebih efektif dan demokratis.

5. Dampak dan Tantangan Transformasi Politik Indonesia

Transformasi politik Indonesia dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi membawa berbagai dampak dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Salah satu dampak yang terlihat adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, terutama di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Ryaas Rasyid yang menyatakan bahwa otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat

¹⁶ Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi* (Yogyakarta: MedPress, 2012).

¹⁷ Mudrajad Kuncoro, "Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema dan Tantangan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9, No. 1 (2004), hlm. 1–12. <https://doi.org/10.23917/jep.v9i1.102>.

¹⁸ Sadu Wasistiono, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Administrasi Negara* (Bandung: Alfabeta, 2009).

untuk terlibat dalam proses pemerintahan.¹⁹

Selain itu, desentralisasi juga memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara lebih mandiri. Pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif. Dalam perspektif reformasi birokrasi, kondisi ini mencerminkan upaya menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).²⁰

Namun demikian, transformasi ini juga menghadirkan berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah munculnya dominasi elit politik di tingkat daerah yang memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan tertentu. Selain itu, praktik seperti korupsi, politik uang, serta lemahnya kapasitas institusi daerah masih menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis. Menurut Didik Supriyanto, dinamika demokrasi lokal masih diwarnai oleh berbagai persoalan struktural yang memengaruhi kualitas pemerintahan daerah.²¹

Secara keseluruhan, transformasi politik Indonesia masih berada dalam proses yang terus berkembang. Keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kesiapan institusi dan kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, serta membangun budaya politik yang lebih demokratis agar tujuan transformasi politik dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Transformasi politik Indonesia menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi, terutama sejak terjadinya Reformasi 1998. Perubahan ini membawa dampak positif berupa meningkatnya partisipasi masyarakat, terbukanya ruang demokrasi, serta meningkatnya peran pemerintah daerah dalam mengelola urusan publik. Namun, di sisi lain, desentralisasi juga menimbulkan dinamika baru, seperti munculnya ketimpangan antar daerah serta berkembangnya dominasi elit politik di tingkat lokal.

Penelitian ini menemukan bahwa peran elit politik tetap menjadi faktor utama dalam menentukan arah dan kualitas transformasi politik di Indonesia. Baik dalam sistem sentralisasi maupun desentralisasi, elit politik menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan struktur kekuasaan guna mempertahankan pengaruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi politik tidak hanya berkaitan dengan perubahan institusional, tetapi juga dengan strategi aktor politik dalam mengelola kekuasaan.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang menggabungkan analisis struktur kekuasaan (sentralisasi dan desentralisasi) dengan peran elit politik secara bersamaan. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika politik di Indonesia, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas kedua aspek tersebut secara terpisah.

Ke depan, diperlukan upaya yang lebih serius dalam memperkuat institusi politik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun budaya politik yang lebih demokratis dan transparan. Hal ini penting agar proses transformasi politik di Indonesia

¹⁹ Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2007).

²⁰ Eko Prasajo, "Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Good Governance," *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 15, No. 1 (2011), hlm. 1–15. <https://doi.org/10.22146/jkap.10285>.

²¹ Didik Supriyanto, "Demokrasi Lokal dan Tantangan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2 (2010), hlm. 45–60.

tidak hanya menghasilkan perubahan struktur, tetapi juga mampu menciptakan sistem pemerintahan yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). Oligarki dan kekuasaan elit di Indonesia. *Jurnal Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jp.v3i1.56>
- Dwipayana, A. A. G. N. A. (2004). Transisi demokrasi dan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 289–304. <https://doi.org/10.22146/jsp.11045>
- Hamid, A. (2018). Elit politik lokal dalam dinamika otonomi daerah. *Jurnal Politik Profetik*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.24252/profetik.v6i1.5898>
- Haris, S. (2010). Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 21(1). <https://doi.org/10.14203/jip.v21i1.44>
- Hidayat, S. (2010). Desentralisasi dan otonomi daerah dalam perspektif state-society relations. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(2). <https://doi.org/10.22146/jsp.10978>
- Jati, W. R. (2012). Desentralisasi dan demokrasi lokal di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(2). <https://doi.org/10.14203/jpp.v9i2.89>
- Kuncoro, M. (2004). Desentralisasi fiskal di Indonesia: Dilema dan tantangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.23917/jep.v9i1.102>
- Mas'ood, M. (2003). Politik dan kekuasaan pada masa Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.22146/jsp.11012>
- Noor, F. (2013). Perilaku politik elit di Indonesia dalam era reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(2), 67–80. <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i2.98>
- Prasojo, E. (2011). Reformasi birokrasi dalam perspektif good governance. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/10.22146/jkap.10285>
- Pratikno. (2009). Governance dan krisis teori organisasi. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 13(2), 1–14. <https://doi.org/10.22146/jkap.10785>
- Rasyid, R. (2007). Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. PT Mutiara Sumber Widya.
- Romli, L. (2016). Oligarki dan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.14203/jip.v13i1.300>
- Supriyanto, D. (2010). Demokrasi lokal dan tantangan otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 45–60.
- Wasistiono, S. (2009). Desentralisasi dan otonomi daerah dalam perspektif administrasi negara. Alfabeta.
- Widodo, J. (2011). Desentralisasi dan pelayanan publik dalam perspektif otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.31113/jia.v8i1.238>
- Winarno, B. (2012). Sistem politik Indonesia era reformasi. MedPress.